

Judul : Revisi UU Sisdiknas, panja PTKL revisi institusi pendidikan
Tanggal : Rabu, 03 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Sisdiknas Panja PTKL Revisi Institusi Pendidikan



Maria Yohana

KOMISI X DPR membentuk Panitia Kerja Perguruan Tinggi Kementerian Lain (Panja PTKL) untuk merespons kegelisahan masyarakat. Panja akan membahas sejumlah isu utama, antara lain soal anggaran dan program studi (prodi).

Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati mengatakan, anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikstisaintek) sangat rendah dibandingkan dengan anggaran PTKL. Karena itu, Komisi X berupaya menertibkan kebijakan dan anggaran agar sesuai dengan putusan konstitusi.

"Ketidaksesuaian ini terjadi karena perlakuan dan tujuan pendidikan kedinasan berbeda dari pendidikan tinggi pada umumnya," terang Esti, Senin (1/9/2025).

Menurut Esti, PTKL seharusnya menyiapkan lulusan khusus untuk kebutuhan kementerian induknya. Namun, kenyataannya lembaga itu justru membuka prodi umum yang tidak dibutuhkan kementerian tersebut.

Dia menegaskan, isu-isu ini akan diintegrasikan ke dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

"Bagaimana PTKL, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kementerian Agama (Kemenag), Kemendikstisaintek, serta beberapa komponen lain yang perlu diperhatikan," tegasnya.

Menurut Esti, langkah ini penting untuk menata ulang peran dan posisi seluruh institusi pendidikan. Termasuk, pendidikan yang berada di bawah Kemenag, seperti Universitas Islam Negeri (UIN), yang kini memiliki dualisme kepemimpinan dan membuka prodi umum.

Senada, anggota Komisi X DPR Furtasan Ali Yusuf mendorong pendekatan yang hati-hati dan spesifik. Pertimbangkan latar belakang historis beberapa PTKL, terutama yang berasal dari institusi pendidikan lama seperti Sekolah Perawat Kesehatan (SPK).

Menurut Furtasan, banyak PTKL awalnya didirikan untuk kebutuhan spesifik kementerian, tapi kini berkembang menyerupai pendidikan tinggi umum.

"PTKL tersebut juga ingin mempertahankan eksistensinya ke depan, jadi jangan sampai diberhentikan," tandasnya.

Furtasan menyoroti keberadaan prodi khusus, seperti pelayaran, yang jarang diselenggarakan PTN maupun PTS. Karena itu, keberadaan PTKL tetap penting, asalkan sesuai kebutuhan internal kementerian dan tidak tumpang tindih dengan perguruan tinggi umum.

Furtasan menyoroti soal anggaran PTKL yang awalnya bersumber dari 20 persen alokasi pendidikan APBN. Namun, postur anggaran untuk 2026 sudah diumumkan. Kesalahan terjadi saat PTKL menyelenggarakan prodi umum yang tidak lagi spesifik untuk kebutuhan internal kementerian. ■ PYB